



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142
Email: febiuwg@gmail.com



PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2016 -2019)

Eva Stevani Wader¹, Syaikhul Fatah², Pascalina Van Sweet Sesa³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih; Email: yanywader@gmail.com

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence about the effect of the General Allocation Fund (DAU) and Regional Original Revenue (PAD) on Regional Government Expenditures in Papua Province. The research sample data that deserve to be processed are 29 regencies/cities consisting of 28 regencies and 1 city in Papua Province, which are sourced from the Realization Report of the Regional Revenue and Expenditure Budget from 2016 to 2019.

The sampling method used multiple linear regression research. The results of this study prove that the General Allocation Fund (X1), Regional Original Income (X2), has a positive and significant effect on Regional Government Expenditures (X3) districts/cities in Papua Province.

Keywords: General Allocation Fund, Regional Original Revenue, Regional Spending

PENDAHULUAN

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat, maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. (Rusmita, 2016)

Berlakunya Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintahan pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah (Ernayani, 2017).

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka Skripsi ini menitik beratkan pada pembahasan sebagai berikut :

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua ?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua?
3. Apakah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua?

Tujuan Penelitian sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah baik untuk mahasiswa maupun untuk institusi pendidikan terutama Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah Provinsi Papua

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Papua terkait pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah sehingga dapat lebih mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi yang dimiliki untuk meningkatkan PAD dan mencapai kemandirian daerah tanpa bergantung pada dana pemerintah pusat serta pelayanan publik yang lebih maksimal.

b. Dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

KAJIAN TEORI

Flypaper effect merupakan sebuah kondisi dimana pihak daerah mengandalkan anggaran belanja pada transfer/grants dari pusat yang secara spesifik merupakan transfer tidak bersyarat (*Unconditional grants*). *Flypaper effect* adalah fenomena penyimpangan dalam hubungan transfer keuangan pemerintah pusat dengan penerimaan atau pengeluaran pemerintah lokal, terjadi ketika pemerintah menerima grant, maka akan dipergunakan untuk meningkatkan pengeluarannya atau belanja tanpa meningkatkan pendapatan asli daerah, Dengan demikian *flypaper effect* adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (DAU) dari pada menggunakan pendapatan asli daerahnya. Fenomena *Flypaper Effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.

Akuntansi sektor publik dideskripsikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, menggolongkan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. departemen dibawahnya. (Sujarweni, 2015 : 1)

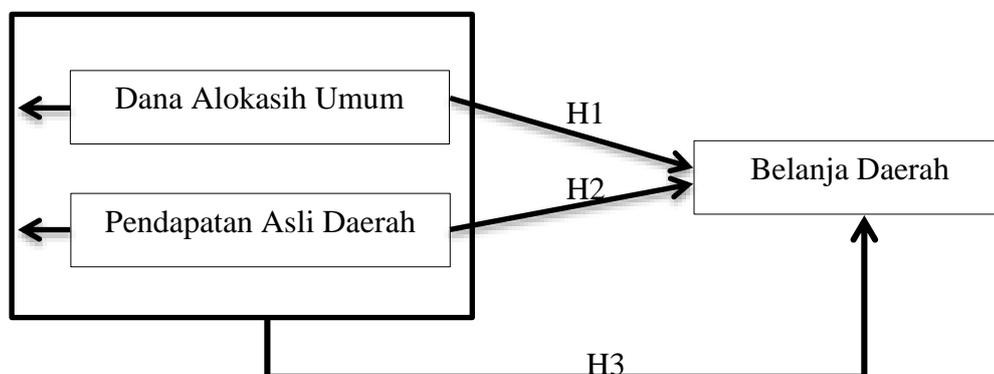
Menurut (Undang-Undang RI No 32 Tahun, 2004) tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat 14 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal tersebut serupa dengan penjelasan pada (Peraturan Pemerintah No 12 Tahun, 2019) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Selain itu APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Menurut (Undang-Undang RI No 33 Tahun, 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah agar dapat mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Susanti, 2016).

Menurut (Undang-Undang RI No 33 Tahun, 2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam (Peraturan Pemerintah No 12 Tahun, 2019) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut (Peraturan Pemerintah No 12 Tahun, 2019) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Menurut (Undang-Undang RI No 33 Tahun, 2004) menyebutkan bahwa “Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Berdasarkan uraian konsep dan teori yang telah dipaparkan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, yakni 28 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua sebanyak 29 daerah, Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Papua di Jl. Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura, Papua.

Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Papua dengan menggunakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono 2008 : 13).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi berupa catatan mengenai Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah dengan cara mempelajari sumber-sumber tertulis baik berupa buku-buku, laporan hasil penelitian, tulisan ilmiah, jurnal dan data dari internet, dan sumber informasi yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dibahas/diteliti untuk digunakan sebagai dasar teori yang digunakan untuk melengkapi proses penyusunan skripsi.

Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, deviasi standar, maksimum, dan minimum dari masing-masing data sampel (Ghozali dan Ratmono, 2013).

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (Independent) model regresi yang seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap.

Uji Hipotesis Uji T-Parsial Untuk menguji variabel Independent secara individual (parsial) maka digunakan uji-t. Untuk melihat ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel Independent dan variabel Dependent.

Uji F – Simultan Untuk menguji variabel Independent terhadap Variabel Dependent yaitu secara bersama-sama (simultan) maka digunakan uji-F. Untuk melihat ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel Independent dan variabel Dependent.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2) Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi sumbangan pengaruh dari variabel independen yaitu Dana alokasi umum (X_1), Pendapatan asli daerah (X_2), terhadap variabel dependen yaitu Belanja daerah Semakin besar R^2 maka semakin kuat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Analisis Regresi Berganda Karena hipotesis penelitian yang dirumuskan menunjuk pada penelitian korelatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik regresi berganda (multiple regression analysis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh DAU terhadap Belanja daerah

Dari hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan nilai signifikansi = 0,00 lebih kecil dari yang di tetapkan $< 0,05$, dan nilai koefisien = 0,224 maka secara individual Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran Alokasi Belanja Daerah. DAU adalah sejumlah dana yang di alokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/ kabupaten/ kota) di indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk dalam pengertian ini adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemda di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan besar kepada masyarakat dan merupakan suatu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Adanya pengaruh positif DAU kepada belanja daerah dapat memberikan Penjelasan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki keterikatan dengan pembangunan infrastruktur daerah. Keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah dapat dikatakan karena bantuan berupa DAU yang dikirimkan dari nasional dan dipergunakan pemda ditujukan untuk mendanai kegiatan atau program pemerintah daerah melalui belanja daerah terutamanya Belanja daerah. DAU yang semakin besar diberikan dari pusat, maka Belanja daerah akan semakin besar yang dianggarkan (Novianto dan Hanafiah, 2015 dan Juniawan & Suryantini, 2018). Dengan hasil temuan ini menunjukkan pemda berketergantungan dengan dana perimbangan yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah dalam mendanai kegiatan daerahnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ernayani, 2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah.

Pengaruh PAD terhadap Belanja daerah

Dari hasil pengujian secara parsial olah data statistik dapat di simpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah dengan memiliki nilai signifikansi = 0,00 lebih kecil dari yang di tetapkan $< 0,05$ dan nilai koefisien = 1,252. hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka Belanja daerahnya semakin tinggi juga yang bisa dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang meningkat akan memberikan manfaat untuk meningkatkan penyediaan fasilitas publik melalui pembangunan sarana dan prasarana terutamanya pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemajuan di daerah tersebut. Dengan ditemukannya hasil penelitian ini, diharapkan masing-masing daerah dapat menggali potensi pembangunan dan kesejahteraan daerahnya secara maksimal.

Pernyataan Friedman (1978) dalam (Dana et al., 2014 dan Bambang Prakosa 2004) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah itu sendiri, misalnya Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA

yang Dipisahkan, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah (Juniawan & Suryantini, 2018).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rihfenti Ernayani, 2017 dan Irfan 2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dana alokasi umum (X1) dan pendapatan asli daerah (X2) secara simultan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah(x3)
2. Dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
3. Pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaniz, B. N. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Eks Karasidenan Pekalongan. In *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Ayem, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Dana Alokasi Khusus Daan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Akuntansi*, 2(2), 169–182. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i2.2987>
- BPS. (2020). Badan Pusat Statistik, Penduduk. In *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>
- Dana, P., Umum, A., Alokasi, D., Dan, K., Asli, P., Terhadap, D., Langsung, B., Propinsi, D. I., & Tengah, J. (2014). *PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA LANGSUNG DI PROPINSI JAWA TENGAH* Nurul Hidayah & Hari Setiyawati. XVIII(01), 45–58.
- Dyah Arsita Sari. (2013). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Boyolali. In *Skripsi*.
- (Dana et al., 2014 dan Bambang Prakosa 2004) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah, Nurul Hidayah & Hari Setiyawati
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>
- Ferdiansyah, I. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, 14(1), 44. <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>
- García Reyes, L. E. (2013). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Gorahe, Irdha Anisyah Marsudi Masinambow, V., & Engka, D. (2014). Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3), 1–12.
- Halim, A. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik. In *Salemba Empat*.
- Indraningrum, T. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). In *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA

- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p05>
- Liando, G. Y. (2016). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1473–1484. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.12369>
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun. (2019). *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri No 13 Tahun. (2006). *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. JDIH.BPK RI.